



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DODOK DWI HANDOKO
2. Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH
3. NHK : 432112

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.372.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000
2. Tanah Seluas 1.746 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI Rp. 272.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **560.000.000**

1. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI W 175 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
5. MOTOR, ROYAL ENFIELD CLASSIC 500 CC CARBURATOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **1.000.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **250.000.001**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **1.274.984.953**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **100.000.000**

Sub Total **Rp.** **5.556.984.954**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

5.556.984.954

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.